

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi primadona dikalangan masyarakat Indonesia. Dengan adanya UMKM, kehidupan masyarakat menjadi terjamin karena dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi tingkat pengangguran. Salah satu lembaga keuangan yang memberikan dukungan terhadap UMKM adalah Bank (Utomo, Aji, and Aravik 2022).

Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional, khususnya dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional dan penyerapan tenaga kerja. Hal ini dapat dilihat dari nilai PDB Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada tahun 2022 mencapai 4.303.571,5 milyar lebih besar dari PDB skala usaha besar, sedangkan sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan yang memiliki nilai paling besar kedua dari keseluruhan nilai di skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu sebesar 1.010.335,8 miliar (Kementerian Koperasi dan UMKM, 2023).

Pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kota Jayapura dari tahun 2015 hingga 2023, jumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) baik kelompok dan perorangan yang sudah terdaftar di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kota Jayapura sebanyak 18 ribu UMKM, 80 persen UMKM didominasi kaum perempuan dan 60 persennya

merupakan orang asli Papua (OAP). Menurut Disperindagkop Kota Jayapura, jumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah saat ini belum mampu mengangkat pelaku UMKM Kota Jayapura ke kancah nasional untuk bersaing secara global, karena rendahnya inovasi, kreativitas, keterampilan dan permodalan (Disperindagkop, 2022).

Menurut Kasmir (2017), masalah yang sering dihadapi dalam dunia usaha umumnya adalah kurangnya permodalan, kemitraan, serta peluang usaha. Permasalahan tersebut dapat menghambat tumbuh dan berkembangnya suatu usaha. Untuk mencapai suatu keberhasilan dalam usaha diperlukan dana yang cukup. Salah satu alternatif sumber pendanaan dapat diperoleh melalui kredit agar dapat melakukan perluasan atau pengembangan usaha.

Guna meningkatkan kemudahan pembiayaan bagi UMKM, pemerintah memperluas fasilitas pembiayaan UMKM di Indonesia dengan adanya program Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR bertujuan untuk memudahkan modal para pelaku UMKM, namun belum sepenuhnya terealisasi. Pada tahun 2023, pemerintah memangkas target penyaluran KUR dari sebelumnya sebesar Rp 470 triliun, diturunkan menjadi Rp 297 triliun hingga akhir tahun 2023. Pemangkasan tersebut dilakukan setelah mencermati realisasi penyaluran KUR yang melambat di semester pertama 2023. Di periode tersebut, penyaluran KUR hanya mencapai Rp 105,47 triliun, atau hanya 23,44% dari target awal. Hingga 30 November 2023, penyaluran KUR di perbankan telah mencapai porsi 77,42% dari target baru, atau senilai Rp 229,95 triliun. KUR tersebut disalurkan kepada 4,12 juta debitur di Indonesia (Kemenkeu, 2024).

Kurangnya penyaluran kredit yang dirasakan oleh usaha kecil didorong oleh keterbatasan akses kredit itu sendiri. Menurut Oktavianti (2017), salah satu hal yang memengaruhi akses kredit oleh usaha kecil yaitu persyaratan kredit yang ditawarkan oleh lembaga penyedia kredit formal. Persyaratan kredit tersebut meliputi jangka waktu pengembalian kredit, jaminan, dan tingkat suku bunga. Pelaku UMKM merasa ragu dalam mengakses kredit ketika mereka tidak memahami mengapa sebuah jaminan harus menjadi sebuah syarat pinjaman. Sedangkan, lembaga penyedia kredit formal lebih menyukai peminjam yang dapat memberikan jaminan.

Adapun rendahnya penyaluran kredit oleh pihak penyalur kredit formal dikarenakan lembaga penyalur kredit formal merasa harus berhati-hati dalam memberikan kredit karena pihak penyalur kredit formal tidak dapat mengetahui kondisi UMKM yang sebenarnya dapat dijelaskan melalui laporan keuangan UMKM (Fadila, 2019).

Pengetahuan keuangan menjadi sebuah hal yang sangat penting karena literasi keuangan pemilik UMKM mempengaruhi keputusan keuangan dan pengelolaan keuangan yang lebih baik bagi UMKM (Anggraeni, 2019). Di Indonesia, tingkat pengetahuan keuangan masyarakat Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara berkembang lainnya. Tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia yang memiliki pengetahuan, kemampuan, dan keyakinan mengelola keuangan dengan baik (*well literate*) indeks literasi keuangan sebesar 49,6% dan inklusi keuangan 85,1% (Otoritas Jasa Keuangan, 2023).

Kurangnya pengetahuan keuangan akan menimbulkan lebih banyak tantangan, khususnya untuk manajemen hutang, tabungan dan kredit, dan perencanaan masa depan. Pengetahuan keuangan yang lebih tinggi secara signifikan berhubungan dengan penggunaan jasa keuangan yang lebih besar dan pengetahuan keuangan tersebut sangat mempengaruhi perilaku perbankan. Seseorang yang memiliki pengetahuan keuangan dari sumber yang berbeda dapat meningkatkan peluang keberhasilan memperoleh kredit (Oktavianti, 2017).

Bank Papua telah menyalurkan kredit usaha mikro dan kecil (UMK) sebesar Rp.376 miliar. "Kredit tersebut disalurkan kepada 4.797 debitur di Tanah Papua. Untuk tahun 2023 pihaknya mengalokasikan dana untuk UMK sebesar Rp. 200 miliar (Bank Papua, 2024). Peran Bank dan lembaga keuangan lainnya sangat penting untuk membantu para pelaku usaha mikro yang kesulitan dalam pemanfaatan fasilitas kredit. Diharapkan para pengusaha UMKM bisa terbantu oleh pinjaman modal dari lembaga-lembaga keuangan yang menyediakan kredit khusus untuk mengatasi keterbatasan modal mereka.

KUR Bank Papua terbagi atas 3 (tiga) skema yaitu KUR Supermikro dengan besar kredit maksimal Rp 10 juta untuk model kerja dan investasi bagi yang belum pernah mengambil fasilitas KUR dan suku bunga murah 6% efektif per tahun dengan jangka waktu pengembalian 3-5 tahun tanpa ada agunan tambahan. KUR Mikro dengan persyaratan sama dengan KUR supermikro namun besar kredit maksimal Rp 200 juta. KUR Kecil maksimal 100-500 juta disertai dengan agunan tambahan minimal 30% dari plafon kredit. Persyaratan KUR Individu (perorangan) yang melakukan usaha produktif dan layak berusia 21 tahun keatas atau sudah menikah, tidak sedang menerima

kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi dari bank lain dan/atau yang tidak sedang menerima kredit Program Pemerintah kecuali KUR pada penyalur yang sama, KPR, KKB, Kredit jaminan surat pensiun, kartu kredit, resi gudang, kredit konsumsi. KUR Supermikro dapat diberikan bagi usaha yang berjalan kurang dari 6 bulan dengan memenuhi salah satu syarat, antara lain mengikuti pendampingan, mengikuti pelatihan kewirausahaan atau pelatihan lainnya, tergabung dalam kelompok usaha, memiliki anggota keluarga yang mempunyai usaha produktif sedangkan KUR mikro usaha secara aktif minimal 6 bulan, tempat usaha milik sendiri dan/atau sewa dilengkapi surat kuasa sewa mengetahui pemerintah setempat. Penyediaan agunan tambahan minimal 30% dari plafon, berupa SHM, SHGB, SHGU, BPKB kendaraan, Cash Collateral (Tabungan/giro/deposito) (Bank Papua, 2024).

Kota Jayapura selain mencanangkan sebagai kota pendidikan, pembangunan ekonominya juga diarahkan untuk pengembangan kota perdagangan dan jasa dimana sektor perdagangan, hotel, dan restoran memberikan kontribusi terbesar dalam perekonomian. Hal ini menunjukkan potensi perkembangan UMKM di Kota Jayapura sangat besar, maka sangat diperlukan bantuan dana KUR untuk para pelaku usaha dengan harapan dapat membantu mengembangkan kinerja UMKM dan meningkatkan unit usaha UMKM di Kota Jayapura. Salah satu penyalur dana KUR di Kota Jayapura adalah Bank PAPUA, mereka menyalurkan dana KUR sejak tahun 2008.

Penelitian mengenai pemanfaatan fasilitas kredit terhadap peningkatan usaha pada penelitan Moku (2018) mengemukakan bahwa pengaruh pemberian Kredit Usaha Rakyat terhadap Peningkatan Usaha Mikro, Kecil,

dan Menengah signifikan terhadap peningkatan usaha UMKM. Berbanding terbalik dengan penelitian Lestari (2020) yang menyatakan bahwa pemberian kredit usaha rakyat tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan usaha UMKM melainkan modal usaha sendiri yang berpengaruh signifikan. Selain itu literasi keuangan dan hubungannya dengan akses kredit ini telah dilakukan oleh peneliti Oktavianti (2017) bahwa pengetahuan atau literasi keuangan berpengaruh positif terhadap peningkatan usaha karena mengetahui keadaan keuangan usahanya dalam permodalan yang dibutuhkan dalam mengakses kredit. Literasi keuangan yang tinggi akan mempengaruhi akses kredit UMKM dalam rangka meningkatkan sumber permodalannya. Berbeda dengan penelitian Tuti & Dwijayanti (2019), bahwa pengetahuan literasi keuangan tidak berpengaruh positif dan signifikan karena sebagian besar pelaku UMKM memiliki tenaga kerja yang sedikit dan terlalu fokus pada kegiatan operasionalnya sehingga tidak memiliki waktu untuk melakukan pencatatan keuangan yang komprehensif meskipun pelaku UMKM dapat mengakses kredit formal.

Berdasarkan kesenjangan yang berbeda antara hasil beberapa penelitian tersebut diatas sehingga penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pemanfaatan Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pengetahuan Keuangan Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus Pada Bank Papua)”

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah

1. Apakah ada pengaruh pemanfaatan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus Pada Bank Papua) ?.
2. Apakah ada pengaruh pengetahuan keuangan Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus Pada Bank Papua) ?.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh pemanfaatan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus Pada Bank Papua).
2. Mengetahui pengaruh pengetahuan keuangan Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus Pada Bank Papua).

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti terutama untuk menambah wawasan dalam hal mengetahui bagaimana pemanfaatan fasilitas kredit usaha rakyat dan pengetahuan keuangan terhadap perkembangan usaha UMKM serta menjadi suatu kesempatan

yang berharga bagi peneliti untuk dapat mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah di peroleh selama masa kuliah.

b. Bagi Akademik

Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat sebagai dokumentasi di perpustakaan Fakultas Ekonomi dan perpustakaan Universitas Cenderawasih serta dapat dikembangkan lebih luas dalam penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini khususnya bagi Bank PAPUA atau bagi lembaga keuangan lainnya yaitu sebagai informasi dan arahan yang baik, sehingga akan mendapatkan gambaran secara global tentang peran kredit usaha rakyat terhadap perkembangan UMKM.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan penelitian ini maka dibuat susunan kajian berdasarkan metodologinya dalam bentuk sistematika penulisan yaitu :

BAB I : Merupakan bab pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang studi, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : Merupakan bab Tinjauan Pustaka. Bab ini menguraikan tentang teori-teori, penelitian sebelumnya dan kerangka pikir/model penelitian yang melandasi dan berkaitan dengan peran kredit usaha rakyat terhadap perkembangan UMKM.

BAB III : Merupakan bab metode penelitian. Bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian yang terdiri dari Lokasi Penelitian, populasi

dan sampel penelitian, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, definisi operasional variabel, pengukuran dan pengujian instrumen.

BAB IV: Merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan

BAB V : Merupakan bab penutup berisi kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka

Lampiran